



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 123 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 110);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 123

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 123 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Pemerintah
Kabupaten Bandung



BUPATI BANDUNG PERATURAN



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANDUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. RAYA SOREANG KM. 17 TELP. (022) 589 7432 SOREANG 40911 Provinsi Jawa Barat

Website : www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DPMD KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 000.7.25/132/DPMD/2025

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

KEPALA DPMD KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang nomer 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 tentang tentang Perunahan Atas Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

15. Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 95 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
17. Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.107-BAPPELITBANGDA/2023 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja PD Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 10 April 2025

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



Drs. H. TATA IRAWAN SUBANDI
Pembina Utama Muda
NIP 19690108 198803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bandung;
2. Wakil Bupati Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
4. Inspektur Kabupaten Bandung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : 000.7.25/132/DPMD/2025
TANGGAL : 10 APRIL 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025**

- Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penanggungjawab : Sekretaris DPMD
Ketua : Kasubag Umum Dan Kepegawaian
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keuangan
Anggota :
1. Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa
2. Ahmad Sodikin S.Ip Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Raden Rizky Rinaldi Raharjo S.Stp (Analis Kebijakan Ahli Muda)
4. Melia Hanggina S. Stp (Penelaah Teknis Kebijakan)
5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
6. Muhamad Iqbal Fauzi S.Stp (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)
7. Hadi Robiansyah S.Ap (Penelaah Teknis Kebijakan)
8. Kepala Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa
9. Wawan Sutiawan S. Stp (Penelaah Teknis Kebijakan)
10. Kepala Bidang Kerjasama dan Pengembangan Potensi Desa
11. Neneng Kurniati S.Sos (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)
12. Drs Trimo Handoko (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Kesekretariatan : 1. Ari Senjaya S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan)

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Drs. H. TATA IRAWAN SUBANDI
Pembina Utama Muda
NIP 19690108 198803 1 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR : 000.7.25/132/DPMD/2025
TANGGAL : 04 APRIL 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026

TUGAS POKOK TIM PENYUSUN PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DPMD**I. PENGARAH**

Memberikan arahan kepada tim dalam melaksanakan penyusunan Penetapan RENJA

II. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Penyusunan Penetapan RENJA

III. KETUA

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Penetapan RENJA.
2. Mengendalikan seluruh kegiatan penyusunan Penetapan RENJA.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala DPMD.

IV. SEKRETARIS

1. Membantu ketua mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Penetapan RENJA.
2. Membantu ketua mengendalikan seluruh kegiatan penyusunan Penetapan RENJA.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Penetapan RENJA kepada ketua.

V. ANGGOTA

1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam penyusunan Penetapan RENJA.
2. Memberikan arahan teknis dalam penanganan dan pengendalian dalam penyusunan Penetapan RENJA.
3. Mengkaji data-data yang terkumpul sebagai bahan penyusunan Penetapan RENJA.

VI. KESEKRETARIATAN

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan pelaksanaan tugas.
2. Memberikan pelayanan teknis administrasi.
3. Menyelenggarakan rapat-rapat pelaksanaan kebijakan berdasarkan petunjuk Sekretaris.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.


KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Drs. H. TATA IRAWAN SUBANDI
Pembina Utama Muda
NIP 19690108 198803 1 004



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;

- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
- e. Penutup; dan
- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.

- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR

FORM E.70

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan PenyusunanbAgenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra- perangkat daerah.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
6	Penelaahan Perubahan RKPD.	√			
7	Perumusan tujuan. sasaran. indikator dan target kinerja.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		√	Tidak terdapat pagu kewilayahan	
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten.		√	Tidak terdapat pagu kewilayahan	
10a.	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan,		√	Tidak terdapat pagu kewilayahan	
10b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
10c.	Mensinkronkan program dankegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10d.	Menyesuaikan pendanaan				

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
	program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja. perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.	√			

Soreang, Juni 2025
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung

Drs. H. TATA IRAWAN SUBANDI
NIP. 19690108 198803 1 004

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, dengan ridho-Nya kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029, dimana Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung selama tahun 2025. Disamping itu Perubahan Rencana Kerja ini merupakan uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap mudah-mudahan Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan tupoksinya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Soreang, Juni 2025
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Drs. H. TATA IRAWAN SUBANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR..... iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 7

 1.4 Sistematika Penyusunan 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PMD TAHUN LALU..... 10

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 10

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 27

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi 33

 2.4 Review Terhadap Ranancangan RKPD..... 34

 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Masyarakat..... 42

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 43

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi..... 43

 3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 46

 3.3 Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan..... 55

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PMD 64

BAB V PENUTUP..... 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan..... 2

DAFTAR TABEL

Tabel II 1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Dians Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Mei Tahun 2025**Error! Bookmark not defined.**

Tabel II 2 Matriks Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30

Tabel II 3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung..... 32

Tabel II 4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Isu-Isu Strategis 33

Tabel II 5 (T-C.31) Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 36

Tabel III 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas PMD Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 48

Tabel III 2 Rencana Kerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 56

Tabel III 3 (T-C. 33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Bandung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan perencanaan pembangunan yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan perangkat daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Selain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

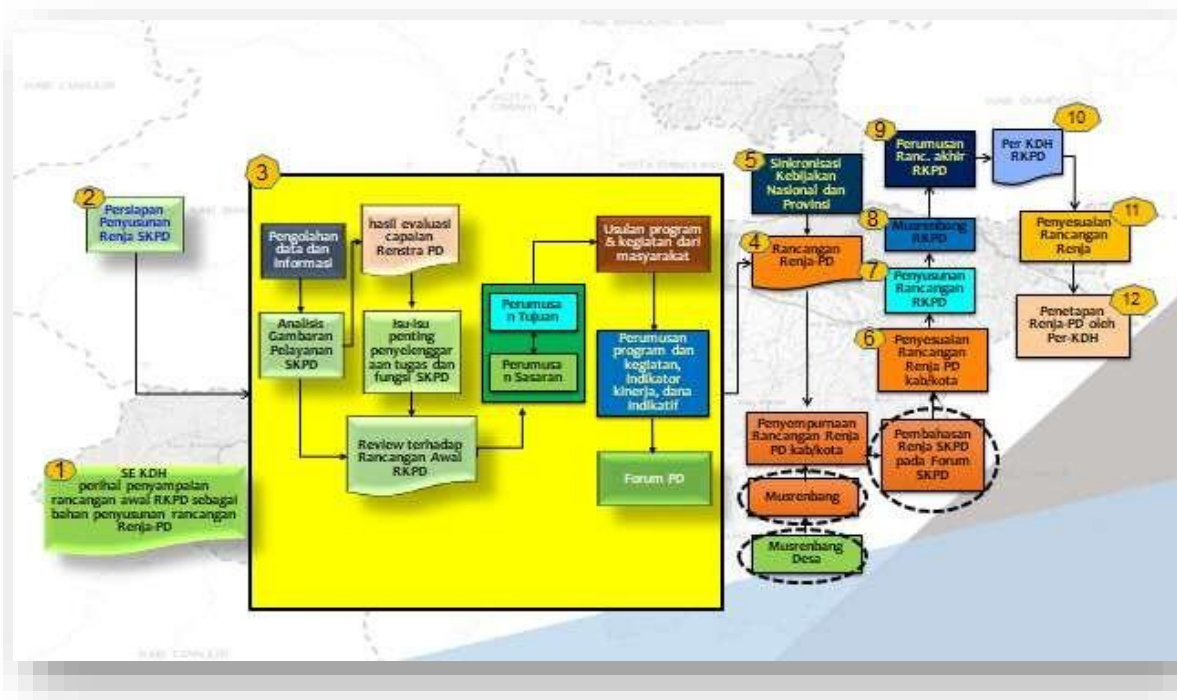
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung. Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RKPD, Renstra dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Perubahan RPJMD adalah Perubahan Renstra Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung memiliki tugas dan fungsi sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 95 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, hasil evaluasi Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan evaluasi Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung tahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan;
19. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 98);

33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025, sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bandung melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya pada periode satu tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
- 2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, menjelaskan hal yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan

atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- 3.3. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang disusun 1(satu) tahun sekali dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Sasaran RKPD dan capaian kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Bandung.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Bandung Tahun 2024 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Bandung Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan, pelaksanaan rencana program/ kegiatan/sub kegiatan serta hasil rencana program/kegiatan/sub kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 berpedoman pada hasil pencapaian kinerja dinas tahun 2024, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari sub kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan/sub kegiatan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2025-2029.

Keberhasilan suatu proses perencanaan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2024 Dinas PMD telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsi. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja sampai dengan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup kegiatan pada table II.1 (T-C.29) berikut ini:

Tabel II 1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renca Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Mei Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP - Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	75,89 Point 93,95%	79,70 Poin 93,63%	75.85 Point 93.75 Persen	80,40 Point 98,43 Persen	105,66% 	75,87 Point 93,85%	80,40 Point 98,43 Persen	105,36%
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100,00%
2	13	01	2.01	'0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	64.29%
2	13	01	2.01	'0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80.00%
2	13	01	2.01	'0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80.00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
2	13	01	2.01	'0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80.00%
2	13	01	2.01	'0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80.00%
2	13	01	2.01	'0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	1 Laporan	4 Laporan	80.00%
2	13	01	2.01	'0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	28 Laporan	80.00%
2	13	01	2.01	'0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	-	-	-	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	50.00%
2	13	01	2.01	'0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	120 Data	-	-	-	100.00%	60 Data	60 Data	50.00%
2	13	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	98.75 Persen	98.75%	100 Persen	100 Persen	100.00%
2	13	01	2,02	'0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2400 Orang/bulan	560 Orang/bulan	40 Orang/bulan	37 Orang/bulan	92,50%	480 Orang/bulan	1484 Orang/bulan	61,83%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
2	13	01	2,02	'0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	120 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100,00%	60 Dokumen	240 Dokumen	80,00%
2	13	01	2,02	'0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	49 Dokumen	81,67%
2	13	01	2,02	'0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	4 Laporan	80,00%
2	13	01	2,02	'0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	01	2,02	'0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 Laporan	36 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100,00%	18 Laporan	72 Laporan	80,00%
2	13	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	100 Persen	N/A	N/A	0,00%	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen
2	13	01	2,03	'0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	N/A

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)-(10/4)
2	13	01	2,03	'0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	N/A
2	13	01	2,03	'0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	N/A
2	13	01	2,03	'0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	0.00%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
2	13	01	2,03	'0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	N/A
2	13	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	98.75 Persen	98.75%	100 Persen	100 Persen	100.00%
2	13	01	2,05	'0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	N/A	N/A	N/A	0.00%	-	N/A	-
2	13	01	2,05	'0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	183 Paket	122 Paket	122 Paket	100.00%	61 Paket	366 Paket	203.33%
2	13	01	2,05	'0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54 Dokumen	48 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	2 Dokumen	52 Dokumen	96.30%
2	13	01	2,05	'0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	212 Dokumen	86 Dokumen	46 Dokumen	46 Dokumen	100.00%	40 Dokumen	172 Dokumen	81.13%
2	13	01	2,05	1'000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	64 Orang	57 Orang	0 Orang	100.00%	21 Orang	85 Orang	101.19%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)-(10/4)
2	13	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	87.50 Persen	87.50%	100 Persen	100 Persen	100.00%
2	13	01	2,06	'0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Paket	24 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	26 Paket	96.30%
2	13	01	2,06	'0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	10 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	14 Paket	93.33%
2	13	01	2,06	'0003	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	79 Paket	73 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	77 Paket	97.47%
2	13	01	2,06	'0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	2 Paket	9 Paket	90.00%
2	13	01	2,06	'0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	22 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	26 Paket	92.86%
2	13	01	2,06	'0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Paket	88.89%
2	13	01	2,06	'0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	N/A	1 Paket	0 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20.00%
2	13	01	2,06	'0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan	250 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	100%	30 Laporan	340 Laporan	125.93%
2	13	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	N/A	N/A	0.00%	-	2 Dokumen	66.67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)-(10/4)
2	13	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100,00%
2	13	01	2,07	'0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	N/A	1 Unit	1 Unit	100,00%	-	-	-
2	13	01	2,07	'0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	46 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00%	2 Unit	51 Unit	728,57%
2	13	01	2,07	'0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	-	-	-
2	13	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100,00%
2	13	01	2,08	'0001	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	8 Laporan	80,00%
2	13	01	2,08	'0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	48 Laporan	80,00%
2	13	01	2,08	'0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	48 Laporan	80,00%
2	13	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	100.00%	85 Persen	85 Persen	100.00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)-(10/4)
2	13	01	2,09	'0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	1 Unit	4 Unit	80.00%
2	13	01	2,09	'0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	30 Unit	21 Unit	21 Unit	100.00%	3 Unit	54 Unit	94.74%
2	13	01	2,09	'0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	31 Unit	4 Unit	4 Unit	100.00%	1 Unit	4 Unit	100.00%
2	13	01	2,09	'0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	1 Unit	4 Unit	100.00%
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	2%	1,11%	2%	2.2%	110.00%	2%	2.2 %	110.00%
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	100%	20 Persen	20 Persen	20 Persen	100,00%	20 Persen	20 Persen	80,00%
2	13	02	2.01	'0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Dokumen	2 Desa	1 Desa	1 Desa	100,00%	1 Desa	4 Desa	80,00%
2	13	02	2.01	'0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	13 Desa	7 Desa	2 Desa	2 Desa	100,00%	2 Desa	11 Desa	84,62%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
2	13	02	2.01	'0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	25 Desa	10 Desa	5 Desa	5 Desa	100,00%	5 Desa	20 Desa	80,00%
2	13	02	2.01	'0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	270 Desa	270 Desa	270 Desa	270 Desa	100,00%	270 Desa	270 Desa	100,00%
2	13	02	2.01	'0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	-	N/A	-
2	13	02	2.01	'0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	3 Unit	75,00%
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	25 Persen	10 Persen	5 Persen	5,48 Persen	109,60%	5 Persen	20,48 Persen	81,92%
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100,00%
2	13	03	2.01	'0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	03	2.01	'0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalamKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	03	2.01	'0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	50 Persen	11,48 Persen	10 Persen	11,48 Persen	114,80%	10 Persen	45,92 Persen	91,84%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)-(10/4)
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	80 Persen	14 Persen	16 Persen	16 Persen	100,00%	18 Persen	60 Persen	75,00%
2	13	04	2.01	'0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00%
2	13	04	2.01	'0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	510 Dokumen	N/A	N/A	N/A	0,00%		N/A	-
2	13	04	2.01	'0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1350 Dokumen	270 Dokumen	270 Dokumen	270 Dokumen	100,00%		540 Dokumen	40,00%
2	13	04	2.01	'0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	15 Dokumen	8 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	14 Dokumen	93,33%
2	13	04	2.01	'0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1022 Orang	859 Orang	810 Orang	810 Orang	100,00%	50 Orang	1719 Orang	168,20%
2	13	04	2.01	'0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	720 Laporan	43 Laporan	270 Laporan	270 Laporan	100,00%	270 Laporan	583 Laporan	80,97%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)-(10/4)
2	13	04	2.01	'0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	93 Dokumen	270 Dokumen	N/A	N/A	0,00%		270 Dokumen	290,32%
2	13	04	2.01	'0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Laporan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	04	2.01	'0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	4 Laporan	80,00%
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Laporan	1 Laporan	N/A	N/A	0,00%		1 Laporan	25,00%
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	270 Dokumen	1 Dokumen	270 Dokumen	270 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	270 Dokumen	100,00%
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen	N/A	N/A	N/A	0,00%		N/A	-
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	241 Orang	341 Orang	50 Orang	50 Orang	100,00%	50 Orang	441 Orang	182,99%
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	50 Desa	20 Desa	270 Desa	270 Desa	100,00%	10 Desa	270 Desa	100,00%
2	13	04	2.01	0016	Fasiltasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	3 Laporan	N/A	N/A	N/A	0,00%		N/A	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)-(10/4)
2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	3 Laporan	N/A	N/A	N/A	0,00%		N/A	-
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Laporan	2 Dokumen	N/A	N/A	0,00%		2 Dokumen	40,00%
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	98,00%	97,72 Persen	97,08 Persen	97,08 Persen	100,00%	97,5 Persen	97,5 Persen	99,49%
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	95%	80 Persen	85 Persen	85 Persen	100,00%	90 Persen	90 Persen	94,74%
2	13	05	2.01	'0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
2	13	05	2.01	'0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Laporan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
2	13	05	2.01	'0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	94 lembaga	2 Lembaga	150 Lembaga	150 Lembaga	100,00%	1 lembaga	153 Lembaga	162,77%
2	13	05	2.01	'0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Unit	N/A	N/A	N/A	0,00%		N/A	-
2	13	05	2.01	'0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Unit	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2022-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)-(10/4)
2	13	05	2.01	'0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Unit	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	4 Laporan	80,00%
2	13	05	2.01	'0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	11 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	2 Laporan	11 Laporan	100,00%
2	13	05	2.01	'0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%		N/A	-
2	13	05	2.01	'0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	48 Dokumen	80,00%

Sehubungan hal tersebut di atas, pengelolaan program/kegiatan /sub kegiatan dan pembinaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus diupayakan untuk lebih ditingkatkan, lebih terencana dan sistematis sehingga target kinerja Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dapat tercapai. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Bandung selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 serta perkiraan target tahun 2025.

Kinerja DPMD Kabupaten Bandung selain berdasarkan sasaran/target rencana strategis perubahan periode sebelumnya juga dilihat dari ketrcapaian target SDG's Kabupaten Bandung. Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDGs/TPB terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global di tahun 2030. Ketujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut antara lain:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidik yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum Perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusi dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk Pembangunan berkelanjutan
15. Melindung, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan



Gambar 2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sumber: sdgs.bappenas.go.id

Konsep TPB/SDGs memiliki 4 (empat) pilar utama yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Pembangunan pilar sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan pilar ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluan kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pembangunan pilar lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pembangunan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Berdasarkan hasil analisis dalam rancangan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026, terdapat 66 indikator TPB/SDGs yang disesuaikan dengan kondisi dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Jumlah indikator tersebut merupakan hasil reduksi terhadap indikator – indikator yang dianggap tidak relevan dengan Kabupaten Bandung seperti indikator – indikator yang memiliki kekhususan seperti khusus untuk Kabupaten 3T, khusus untuk daerah yang terdapat danau dan wilayah sungai prioritas, khusus untuk kabupaten yang menjadi kota pusaka, dan lain sebagainya. Indikator-indikator tersebut telah mencakup 4 pilar pembangun yang terdiri atas 14 tujuan dan 41 target. Adapun jumlah indikator yang digunakan untuk menilai capaian indikator TPB/SDGs pada laporan ini berjumlah 85 indikator, dimana terdapat beberapa sub indikator yang merupakan penjabaran dari 66 indikator yang telah ditetapkan dalam RAD TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026

Dalam hal ini, DPMD Kabupaten Bandung berada pada Pilar ke 2 yaitu Pembangunan Ekonomi tujuan SDG's ke sepuluh yaitu “Berkurangnya Kesenjangan Intra dan Antar Negara”. Dengan sasaran “Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional” dengan indikator Jumlah Desa Mandiri.

Tabel 2.2.
Rencana Capaian SDG's Pemerintah Kabupaten Bandung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Nama Indikator SDGs	SATUAN	Tahun Dasar (Baseline)	Realisasi			Target					Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan Pembangunan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara												
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional												
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri	Desa	119	162	186		126	146	187	197	207	DPMD
		%	44,07%	60,00%	68,89%		46,67%	54,07%	69,26%	72,96%	76,67%	

Sumber : SE Bappenas No. T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Tanggal 8 Mei 2025

Tabel 2.2 merupakan tabel perbandingan realisasi persentase jumlah desa mandiri tahun 2021-2023 dengan target jumlah desa mandiri tahun 2022-2026. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian kinerja jumlah desa mandiri di Kabupaten Bandung berdasarkan Indeks Desa Membangun yang di tetapkan pada tahun 2024 mencapai 186 desa atau sebesar 68,89% dari total desa yang berjumlah 270 desa. dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 146 desa, pencapaian realisasi kinerja pada tahun 2023 tercapai 127%. Pada tahun 2024 untuk strata desa mandiri di Kabupaten bandung sampai dengan bulan Mei 2025, Kemendes PDTT belum menetapkan strata desa mandiri karena sedang peroses pembaharuan perumusah perhitungan desa mandiri dari semula berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di rumah menjadi berdasarkan Indeks Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dinas PMD sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan memper-tanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sedangkan fungsinya:

- 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah membantu pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, marginal dan kaum muda pencari kerja serta kelompok perempuan agar mereka bisa lebih mandiri, maka orientasi pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need approach*), pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat (*bottom up approach*), pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat (*community institutional approach*), berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat (*prosperity approach*), pendekatan lintas sektoral dan program (*cross sectoral program approach*), pendayagunaan teknologi tepat guna (*appropriate technology approach*) serta pemberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan (*rural and urban community approach*).

Untuk mengukur apakah proses dan tujuan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak maka diperlukan suatu indikator. Adapun tantangan dalam menentukan indikator pemberdayaan masyarakat tersebut, antara lain:

1. Pembinaan dan pendampingan desa yang belum maksimal;
2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa;
3. Lembaga desa yang belum berfungsi secara maksimal;
4. Lembaga ekonomi yang belum berfungsi dengan maksimal mencermati hasil analisis gambaran Rencana Strategis (Renstra).

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat, dan Rencana Strategis (Renstra) K/L, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung ke depan sebagai berikut:

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan
 - a. Banyaknya desa yang membutuhkan pembinaan, dengan aksesibilitas yang belum memadai;

- b. Masih rendahnya kapasitas aparat desa dalam hal teknis pemerintahan desa, dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam hal meningkatkan kerjasama antar desa;
- c. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan desa kapasitas keuangan desa dibanding dengan tanggung jawab yang semakin besar terutama untuk desa yang SDA nya terbatas di desa perbatasan; Keterbatasan jaringan jalan dan sarana penghubung lainnya serta jaringan telekomunikasi yang menghubungkan ke desa;
- d. Belum optimalnya keterlibatan swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat lokal dalam pembangunan desa;
- e. Rencana Strategis DPMD 2025-2029;
- f. Minimnya informasi dan akses masyarakat desa terhadap modal, input produksi, teknologi, pasar, serta peluang usaha dengan kerjasama investasi.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Adanya peraturan perundang-undangan tentang desa yang memudahkan pembinaan dan pengawasan oleh DPMD;
- b. Adanya program Dana Desa, Alokasi Dana Perimbangan Desa, infrastruktur desa, dan Raksa Desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa;
- c. Adanya pendamping profesional program P3MD Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT);
- d. Adanya sinergi dan kolaborasi serta inovasi program pusat-provinsi Jawa Barat-Kabupaten Bandung antara lain: digitalisasi desa, penyediaan internet di lokasi desa yang *blankspot*, penguatan kelembagaan BUMDesa, serta aplikasi sistem keuangan desa berbasis IT.

Untuk mengetahui strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka dilakukan analisis kemampuan organisasi dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Oportunities dan Threats*), baik terhadap kondisi organisasi institusi maupun terhadap program

dan kegiatan yang dilakukan. Analisis SWOT guna mengetahui strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut.

Tabel II 2 Matriks Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Faktor eksternal dan Faktor internal	Peluang (<i>opportunity</i>): a. Perubahan paradigma Pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; b. Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang terus berkembang; c. Akses pemasaran untuk hasil usaha masyarakat yang berdaya saing dan berkualitas; d. Kebijakan Pembangunan daerah yang diprioritaskan untuk desa dan Kawasan perdesaan serta penanggulangan kemiskinan.	Tantangan (<i>threatment</i>): a. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; b. Potensi sumber daya alam perdesaan yang melimpah, belum dikelola secara optimal; c. Tingginya angka kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan; d. Perubahan paradigma dari pemerintah (<i>government</i>) menjadi pemerintahan (<i>governance</i>), pergeseran paradigma dari pembangunan ke pemberdayaan.
Kekuatan (<i>strenght</i>): a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tupoksi pemberdayaan masyarakat; b. Pendampingan (Kerjasama dengan perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan); c. Tersedianya SDM aparatur; d. Koordinasi yang baik antar perangkat daerah.	Alternatif strategi: a. Peningkatan kualitas kehidupan social ekonomi desa dengan peningkatan pendapatan masyarakat; b. Pengembangan desa dan kawasan perdesaan melalui proses pendampingan; c. Peningkatan pemanfaatan TTG dan pelestarian potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; d. Pengembangan konsep managerial (<i>marketing</i>) dalam meningkatkan kapasitas desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan.	

Berdasarkan penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

- 1. Mengembangkan pola pikir dan manajemen kinerja aparatur;
- 2. Meningkatkan fasilitas pendukung kinerja aparatur yang tepat guna dan

“up to date”;

3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintahan desa;
4. Penataan administrasi desa;
5. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis data, dan teknologi informasi;
6. Penguatan peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;
7. Penguatan BUMDesa sebagai penggerak ekonomi di perdesaan;
8. Penguatan lembaga ekonomi perdesaan melalui bantuan permodalan, pengembangan potensi desa, kerjasama ekonomi berbasis kawasan;
9. Peningkatan pemanfaatan TTG dan pemanfaatan potensi desa yang berwawasan lingkungan;
10. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya serta kearifan lokal desa;
11. Peningkatan partisipasi aktif peran kelompok masyarakat dalam pembangunan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, sebagai perangkat daerah merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk Renstra periode 2025-2029 sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
2. Aset dalam kondisi baik;
3. Meningkatnya Desa Mandiri;
4. Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif.

Capaian Kinerja dari keempat sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di atas dapat digambarkan pada Tabel II 2 (T-C.30) berikut

Tabel II 3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-		Proyeksi Tahun Ke-		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	7	11	13
1	Nilai Sakip PD			74,00	74,25	75,85	75,87	75,89	79,70	80,40	80,40	80,42	
2	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik			93,55	93,65	93,75	93,85	93,95	93,63	98,43	93,85	93,95	
3	Persentase Desa Mandiri			46,67	54,07	69,26	72,96	76,67	68,14	49,63	57,78	59,26	
4	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Yang Aktif			91,00	92,00	97,08	97,50	98,00	97,11	98,50	97,50	98,00	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas PMD Kabupaten Bandung antara lain adalah keterbatasan anggaran, locus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta *database* yang masih terbatas terhadap aspek hasil analisis Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Capaian target indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa sinergitas, tetapi belum dapat dikomparasikan yang selengkapnya sebagaimana dalam Tabel II.4.

Tabel II 4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Isu-Isu Strategis

MASALAH POKOK	AKAR MASALAH	AKAR DARI AKAR MASALAH
Belum meratanya Pembangunan di wilayah perdesaan	Belum Optimalnya Peranan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Membangun Desa	
	Belum optimalnya penataan desa	Kurangnya Pemahaman pemerintah desa dan masyarakat terhadap pemekaran desa. Banyak faktor-faktor keberatan masyarakat terhadap pemekaran desa
	Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi di desa	Masih kurangnya Desa yang melaksanakan kerjasama desa
		Belum optimalnya keterlibatan desa dan kawasan perdesaan di ekonomi
		Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan program kerja sama sehingga dapat memicu ketidakpercayaan antar pihak
		Belum optimalnya kolaborasi dengan PLUT dalam pemberdayaan potensi ekonomi di desa
		Belum optimalnya keterlibatan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi di desa
		Belum optimalnya pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
	Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa	Banyaknya aparatur desa dan anggota BPD yang belum memiliki kapasitas memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengadministrasian kegiatan yang dilakukan oleh desa
		Keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana desa
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa

MASALAH POKOK	AKAR MASALAH	AKAR DARI AKAR MASALAH
	Belum optimalnya tertib Administrasi pemerintahan desa	Belum optimalnya pengelolaan aset desa
	Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan di desa	Belum optimalnya sinergitas perencanaan tingkat kabupaten dengan desa
		Belum optimalnya peran LPM dalam perencanaan pembangunan dan pemahaman SDM pada LPM dalam memahami tupoksi dan keikutsertaan pada proses perencanaan pembangunan
	Belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dengan stakeholders masyarakat	Keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LKD.
		Belum optimalnya pemahaman pemerintah desa tentang LAD.
		Belum optimalnya partisipasi PKK terkait bidang pemberdayaan des/kelurahan.
		Belum optimalnya partisipasi posyandu terkait bidang pemberdayaan desa/kelurahan.
		Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam pembangunan perdesaan.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan apabila tidak diantisipasi dengan factor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada Tindakan yang dilakukan makan akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di DPMD Kabupaten Bandung yaitu :

1. Belum Optimalnya Peranan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Membangun Desa;
2. Belum optimalnya penataan desa;
3. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi di desa;
4. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa;
5. Belum optimalnya tertib Administrasi pemerintahan desa;
6. Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan di desa;
7. Belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dengan stakeholders masyarakat.

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 2025

Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program, kegiatan, dan sub kegiatan

dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah disusun pada semester kedua tahun sebelumnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan situasi dan kondisi, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut perlu mendapatkan *review*. Adapun *review* terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II 5 (T-C.31) Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	0	0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bandung	- Nilai AKIP - Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	75,87 Point 93,85%	13.183.565.507,56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bandung	- Nilai AKIP - Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	80,40 Point 93,85%	11.877.031.360,00
2	13	1	2,01	0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	24.456.160,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	22.399.245,00
2	13	1	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.000.000,00
2	13	1	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.373.275,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.340.460,00
2	13	1	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00
2	13	1	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
2	13	1	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
2	13	1	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.500.000,00
2	13	1	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	4.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.975.900,00
2	13	1	2,01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.082.885,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.082.885,00
2	13	1	2,01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data	1.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data	1.000.000,00
2	13	1	2,02	0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	11.245.440.032,56	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	10.047.333.792,00
2	13	1	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/bulan	11.230.440.032,56	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/bulan	10.032.333.792,00

Kode					Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	2.500.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.500.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000,00
2	13	1	2,03	0000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	100 Persen	10.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	100 Persen	10.000.000,00
2	13	1	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00
2	13	1	2,05	0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	94.450.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	92.086.008,00
2	13	1	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	36.950.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	36.950.000,00
2	13	1	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	5.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.636.008,00
2	13	1	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40 Dokumen	2.500.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	50.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	50.000.000,00
2	13	1	2,06	0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	660.781.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	481.474.600,00
2	13	1	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.152.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.152.000,00

Kode					Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000,00
2	13	1	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	56.209.600,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	56.209.600,00
2	13	1	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	34.250.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	34.250.000,00
2	13	1	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.170.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.170.000,00
2	13	1	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00
2	13	1	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-
2	13	1	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	350.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	190.693.000,00
2	13	1	2,07	0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100 Persen	17.900.200,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100 Persen	17.900.200,00
2	13	1	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	17.900.200,00	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	17.900.200,00
2	13	1	2,08	0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	861.139.515,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	936.439.515,00
2	13	1	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00
2	13	1	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.000.000,00
2	13	1	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	806.139.515,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	861.439.515,00
2	13	1	2,09	0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase barang yang terpelihara	85 Persen	269.398.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase barang yang terpelihara	85 Persen	269.398.000,00
2	13	1	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.330.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.330.000,00
2	13	1	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	131.068.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	131.068.000,00

Kode					Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	30.000.000,00
2	13	1	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00
					Jumlah 1				13.183.565.507,56					11.877.031.360,00
2	13	2	0	0000	PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten Bandung	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	2 Persen	380.000.000,00	PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten Bandung	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	2 Persen	259.193.400,00
2	13	2	2,01	0000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kabupaten Bandung	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	20 Persen	380.000.000,00	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kabupaten Bandung	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	20 Persen	259.193.400,00
2	13	2	2,01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	225.000.000,00	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	208.500.000,00
2	13	2	2,01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	100.000.000,00	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	26.674.700,00
2	13	2	2,01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa	25.000.000,00	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa	3.218.700,00
2	13	2	2,01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	270 Desa	25.000.000,00	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	270 Desa	15.800.000,00
2	13	2	2,01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	5.000.000,00
2	13	3	0	0000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Bandung	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	5 Persen	316.893.920,00	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Bandung	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	5 Persen	169.200.833,00
2	13	3	2,01	0000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kabupaten Bandung	Prosentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	100 Persen	316.893.920,00	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kabupaten Bandung	Prosentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	100 Persen	169.200.833,00
2	13	3	2,01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	44.883.500,00
2	13	3	2,01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	62.977.500,00
2	13	3	2,01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	166.893.920,00	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	61.339.833,00
2	13	4	0	0000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Bandung	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	10 Persen	11.439.836.511,00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Bandung	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	10 Persen	10.359.130.528,00

Kode					Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	4	2,01	0000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	18 Persen	11.439.836.511,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	18 Persen	10.359.130.528,00
2	13	4	2,01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	711.066.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	619.821.000,00
2	13	4	2,01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	8.143.105.300,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	8.053.444.000,00
2	13	4	2,01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	570.395.800,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	270 Orang	570.395.800,00
2	13	4	2,01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	270 Laporan	1.010.131.031,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	270 Laporan	83.132.048,00
2	13	4	2,01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	125.000.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	231.983.800,00
2	13	4	2,01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	250.000.000,00	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	47.350.000,00
2	13	4	2,01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	125.088.000,00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	125.088.000,00
2	13	4	2,01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	151.343.580,00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	72.993.580,00
2	13	4	2,01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	150.000.000,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	150.000.000,00
2	13	4	2,01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	10 Desa	203.706.800,00	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	270 Desa	154.922.300,00
2	13	4	2,01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		-	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	250.000.000,00
2	13	5	0	0000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Bandung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	97,50 Persen	5.026.416.800,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Bandung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	97,5 Persen	4.497.977.050,00

Kode						Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	5	2,01	0000		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	90%	5.026.416.800,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	90 Persen	4.497.977.050,00
2	13	5	2,01	0001		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	35.000.000,00	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	32.160.000,00
2	13	5	2,01	0002		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	78.869.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	66.849.000,00
2	13	5	2,01	0003		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	230.066.800,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	171.431.050,00
2	13	5	2,01	0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	100.000.000,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	95.060.000,00
2	13	5	2,01	0007		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	2.219.100.000,00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	1.819.100.000,00
2	13	5	2,01	0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	2.363.381.000,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	2.313.377.000,00
										17.163.147.231,00					15.285.501.811,00
										30.346.712.738,56					27.162.533.171,00

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Masyarakat

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja tahunan dan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas yang tidak memiliki pagu kewilayahan sehingga tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas perekomendasi Bantuan Keuangan Kepada Desa, sehingga Dinas PMD berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi yaitu memfasilitasi pemerintah desa dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Tabel II.6 TC.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bandung
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Pembahasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan, selain berfokus pada tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025 yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, tetapi juga mencakup penelaahan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional (ASTA CITA) sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan,

Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Uraian terhadap 8 (delapan) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2025-2029, akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, hingga arah kebijakan Kabupaten Bandung dalam rangka mendukung visi Terwujudnya Indonesia Sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”. Perwujudan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yaitu “Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar” dapat dijabarkan pada tujuan dan Sasaran, sebagai berikut :

Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cagur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya derajat kesehatan individu;
- b. Terbentuknya individu beretika dan berbudaya;
- c. Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
- d. Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan;
- e. Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.

2. Tujuan 2.1: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran :

- a. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri;
- b. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk Swasembada Pangan;
- c. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa;
- d. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif.

3. Tujuan 2.2: Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja;
- b. Meningkatnya Kualifikasi, kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja;
- c. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.

4. Tujuan 3: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Kewilayahan, Infrastruktur Dasar

di Pedesaan dan Kawasan Konservasi, Serta Penataan Perkotaan yang Berbasis Lingkungan;

b. Meningkatnya Ketrampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil;

c. Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat.

5. Tujuan 4.1: Terciptanya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:

a. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif;

b. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan.

6. Tujuan 4.2: Terciptanya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan bersih.

a. Meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Prioritas pembangunan nasional dan provinsi tersebut searah dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang tertuang pada Visi Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 yaitu “**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera**”, Visi tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan terpilihnya kepala daerah masa jabatan 2025-2029 yang membawa visi “**Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas) Maju, Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas**” dengan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berakhlak dan berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi; dan
5. Menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban Umum.

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung berada dalam misi ke-empat yaitu “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi”, dengan tujuan “Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah berbasis infastruktur yang terintegrasi, berketahan dan berkelanjutan”, indikator kinerja utama “Indeks

Perkembangan Wilayah”, sasaran “Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan”, dan indikator sasaran “Persentase Desa Mandiri”.

3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan visi dan misi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung didukung oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025, sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan”.

Sebagai perwujudan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa tujuan dan sasaran sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran dan Indikator
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				(2024)	2025	2026	2027	2028	2029	
I	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Wilayah Perdesaan		Persentase Desa Mandiri	49,63%	57,78%	59,26%	61,48%	62,59%	64,81%	68,15%
I.1		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	N/A	16,42%	2,56%	3,75%	1,81%	3,55%	5,14%

terpenting dalam proses perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas PMD menjabarkan dalam kebijakan program dan kegiatan, untuk mencapai strategi Dinas PMD selama kurun waktu 2025 s/d 2029.

Tabel III.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa			Persentase Desa Mandiri		
					Persentase peningkatan status desa mandiri		
			Meningkatnya kualitas penataan desa		Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	PROGRAM PENATAAN DESA	
				Terselenggaranya fasilitasi Penataan Desa	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	
						Pembentukan. Penghapusan. Penggabungan. dan Perubahan Status Desa	
						Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
						Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
						Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
						Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
			Meningkatnya efektivitas kerjasama desa		Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	
						Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan		Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
			pengawasan pemerintahan desa				
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
						Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
						Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	
						Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
						Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
						Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
						Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
						Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
						Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
						Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	
						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
						Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK, Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah		- Nilai AKIP - Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPDx`	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

3.2 Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Program prioritas yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa. pembangunan harus dititik beratkan pada upaya meningkatkan kinerja pembangunan desa. Peningkatan kinerja pembangunan desa harus berorientasi pada penguatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. pengembangan kapasitas keuangan desa. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi pembangunan. peningkatan ekonomi perdesaan. peningkatan usaha pelestarian lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kualitas kerja. pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. pemberdayaan adat dan sosial budaya. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025 Rumusan Rencana Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. sebagaimana tercantum dalam tabel III.3 berikut :

Tabel III.3 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026
Kabupaten Bandung

Kode					Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	0	0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bandung	- Nilai AKIP - Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	80,40 Point 93,85%	11.877.031.360,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bandung	- Nilai AKIP - Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	75,89 Point 93,95%	10.891.537.463,00
2	13	1	2,01	0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	22.399.245,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	24.500.000,00
2	13	1	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.000.000,00
2	13	1	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	3.340.460,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00
2	13	1	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00
2	13	1	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
2	13	1	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
2	13	1	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.000.000,00
2	13	1	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.975.900,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.500.000,00
2	13	1	2,01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.082.885,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00
2	13	1	2,01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data	1.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data	1.000.000,00
2	13	1	2,02	0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	10.047.333.792,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	9.646.337.463,00
2	13	1	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/bulan	10.032.333.792,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/bulan	9.631.337.463,00

Kode					Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	2.500.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.500.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000,00
2	13	1	2,03	0000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	100 Persen	10.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	100 Persen	10.000.000,00
2	13	1	2,03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00
2	13	1	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
2	13	1	2,03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2.000.000,00
2	13	1	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000,00
2	13	1	2,03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
2	13	1	2,05	0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	92.086.008,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	48.750.000,00
2	13	1	2,05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	2.500.000,00

Kode					Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	36.950.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	33.750.000,00
2	13	1	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.636.008,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	5.000.000,00
2	13	1	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40 Dokumen	2.500.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40 Dokumen	2.500.000,00
2	13	1	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	60 Orang	50.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	5.000.000,00
2	13	1	2,06	0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	481.474.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	334.420.000,00
2	13	1	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.152.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00
2	13	1	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00
2	13	1	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	56.209.600,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	30.000.000,00
2	13	1	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	34.250.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	34.250.000,00
2	13	1	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.170.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.170.000,00
2	13	1	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00
2	13	1	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
2	13	1	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	190.693.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	100.000.000,00
2	13	1	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-
2	13	1	2,07	0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100 Persen	17.900.200,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100 Persen	5.000.000,00

Kode					Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
2	13	1	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	17.900.200,00	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.000.000,00
2	13	1	2,07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-
2	13	1	2,08	0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	936.439.515,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	644.200.000,00
2	13	1	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00
2	13	1	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00
2	13	1	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	861.439.515,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	589.200.000,00
2	13	1	2,09	0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase barang yang terpelihara	85 Persen	269.398.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung	Persentase barang yang terpelihara	85 Persen	178.330.000,00
2	13	1	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.330.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.330.000,00
2	13	1	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	131.068.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100.000.000,00
2	13	1	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10.000.000,00

Kode					Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	1	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00
					Jumlah 1				11.877.031.360,00					10.891.537.463,00
2	13	2	0	0000	PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten Bandung	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	2 Persen	259.193.400,00	PROGRAM PENATAAN DESA	Kabupaten Bandung	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	2 Persen	125.000.000,00
2	13	2	2,01	0000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kabupaten Bandung	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	20 Persen	259.193.400,00	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kabupaten Bandung	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	20 Persen	125.000.000,00
2	13	2	2,01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	208.500.000,00	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	25.000.000,00
2	13	2	2,01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	26.674.700,00	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	45.000.000,00
2	13	2	2,01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa	3.218.700,00	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa	25.000.000,00
2	13	2	2,01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	270 Desa	15.800.000,00	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	270 Desa	25.000.000,00
2	13	2	2,01	0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	13	2	2,01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	5.000.000,00
2	13	3	0	0000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Bandung	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	5 Persen	169.200.833,00	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Bandung	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	5 Persen	125.000.000,00
2	13	3	2,01	0000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kabupaten Bandung	Prosentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	100 Persen	169.200.833,00	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kabupaten Bandung	Prosentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	100 Persen	125.000.000,00
2	13	3	2,01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	44.883.500,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00
2	13	3	2,01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	62.977.500,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00
2	13	3	2,01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	61.339.833,00	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	25.000.000,00
2	13	4	0	0000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Bandung	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	10 Persen	10.359.130.528,00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Bandung	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	10 Persen	7.153.400.000,00

Kode					Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	4	2,01	0000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	18 Persen	10.359.130.528,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	20 Persen	7.153.400.000,00
2	13	4	2,01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	619.821.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	100.000.000,00
2	13	4	2,01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	270 Dokumen	25.000.000,00
2	13	4	2,01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	-	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	270 Dokumen	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	8.053.444.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	6.128.400.000,00
2	13	4	2,01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	270 Orang	570.395.800,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	100.000.000,00
2	13	4	2,01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	270 Laporan	83.132.048,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	270 Laporan	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-	-	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	31 Dokumen	25.000.000,00
2	13	4	2,01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	231.983.800,00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	100.000.000,00
2	13	4	2,01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	47.350.000,00	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	100.000.000,00
2	13	4	2,01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	25.000.000,00
2	13	4	2,01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	125.088.000,00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-	-	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00

Kode					Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	4	2,01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	72.993.580,00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	150.000.000,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Bandung	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	100.000.000,00
2	13	4	2,01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	270 Desa	154.922.300,00	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	10 Desa	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0016	Fasiltasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-	Fasiltasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Laporan	50.000.000,00
2	13	4	2,01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	-	-	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
2	13	4	2,01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	250.000.000,00	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000,00
2	13	5	0	0000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Bandung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	97,5 Persen	4.497.977.050,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Bandung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	98 Persen	933.381.000,00
2	13	5	2,01	0000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	90 Persen	4.497.977.050,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	95 Persen	933.381.000,00
2	13	5	2,01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	32.160.000,00	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	35.000.000,00
2	13	5	2,01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	66.849.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	135.000.000,00

Kode					Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	5	2,01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	171.431.050,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	100.000.000,00
2	13	4	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		-	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	25.000.000,00
2	13	5	2,01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	75.000.000,00
2	13	5	2,01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	95.060.000,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000,00
2	13	5	2,01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	1.819.100.000,00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	150.000.000,00
2	13	4	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		-
2	13	5	2,01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	2.313.377.000,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	363.381.000,00
									15.285.501.811,00					8.336.781.000,00
									27.162.533.171,00					19.228.318.463,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, baik yang bersifat teknokratis, *top down*, *bottom up* maupun politis. Perubahan Rencana Kerja yang bersifat teknokratis berasal dari rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan target-target kinerja yang akan dicapai selama periode Renstra. Perubahan Rencana kerja yang bersifat *top down*, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir program-program dari instansi vertikal seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Perubahan Rencana Kerja yang bersifat *bottom up*, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan dari pemerintah desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan yang di-input kedalam aplikasi SIPD. Sedangkan Perubahan Rencana Kerja yang bersifat politis merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bandung.

Pendanaan tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya mengakomodir yang bersifat teknokratis dan *top down*. Pendanaan dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025. Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 terlampir pada tabel IV.I sebagai berikut :

Tabel IV.I
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	2	13	1	0	0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai AKIP - Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Kabupaten Bandung	80,40 Point 93,85%	12.997.754.715,56	
		2	13	1	2	0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kabupaten Bandung	100 Persen	20.316.360,00	
		2	13	1	2	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	6 Dokumen	4.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	3.340.460,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	3.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	2.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	2.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bandung	1 Laporan	3.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	7 Laporan	1.975.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1.082.885,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	60 Data	1.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		2	13	1	2	0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Kabupaten Bandung	100 Persen	10.047.333.792,00	
		2	13	1	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bandung	480 Orang/bulan	10.032.333.792,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU)
		2	13	1	2	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bandung	60 Dokumen	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bandung	12 Dokumen	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bandung	1 Laporan	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bandung	18 Laporan	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	Kabupaten Bandung	100 Persen	10.000.000,00	
		2	13	1	2	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bandung	1 Laporan	10.000.000,00	
		2	13	1	2	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Kabupaten Bandung	100 Persen	92.086.008,00	
		2	13	1	2,1	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Bandung	41 Paket	36.950.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	2.636.008,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		2	13	1	2,1	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bandung	40 Dokumen	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kabupaten Bandung	60 Orang	50.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kabupaten Bandung	100 Persen	481.474.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bandung	2 Paket	50.152.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bandung	4 Paket	100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Bandung	3 Paket	56.209.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bandung	3 Paket	34.250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bandung	2 Paket	40.170.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Bandung	1 Paket	20.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bandung	30 Laporan	170.693.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	Kabupaten Bandung	100 Persen	17.900.200,00	
		2	13	1	2,1	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Bandung	4 Unit	17.900.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Bandung	100 Persen	861.139.515,00	
		2	13	1	2,1	0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bandung	2 Laporan	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0005	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bandung	12 Laporan	45.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		2	13	1	2,1	0009	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bandung	12 Laporan	806.139.515,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		2	13	1	2,1	0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara	Kabupaten Bandung	85 Persen	269.398.000,00	
		2	13	1	2,1	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Bandung	1 Unit	38.330.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Bandung	18 Unit	131.068.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bandung	43 Unit	30.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	1	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bandung	1 Unit	70.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
Jumlah 1											11.877.031.360,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	2	0	0000	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	Kabupaten Bandung	2 Persen	307.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	2	2	0000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	Kabupaten Bandung	20 Persen	307.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	2	2	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Bandung	1 Desa	208.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	2	2	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kabupaten Bandung	2 Desa	60.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	2	2	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kabupaten Bandung	5 Desa	17.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	2	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kabupaten Bandung	270 Desa	15.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	2	2.01	0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	2	2	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kabupaten Bandung	1 Unit	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	3	0	0000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	Kabupaten Bandung	5 Persen	237.447.420,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	3	2	0000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	Kabupaten Bandung	100 Persen	237.447.420,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		2	13	3	2	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	X'	44.883.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	3	2	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	62.977.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	3	2	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	129.586.420,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	0	0000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	Kabupaten Bandung	10 Persen	10.359.130.528,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	Kabupaten Bandung	18 Persen	10.359.130.528,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	669.821.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Bandung	3 Dokumen	8.131.355.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Bandung	270 Orang	570.395.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Bandung	270 Laporan	552.839.248,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	104.072.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Bandung	1 Laporan	222.350.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	125.088.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
		2	13	4	2	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	122.993.580,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Bandung	50 Orang	150.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Bandung	270 Desa	154.922.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa	2	13	5	0	0000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	Kabupaten Bandung	97,5 Persen	6.038.674.071,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	5	2	0000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	Kabupaten Bandung	90 Persen	6.038.674.071,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	5	2	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	32.160.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	5	2	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	492.349.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	5	2	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Bandung	1 lembaga	171.431.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
							Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
		2	13	5	2	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	5	2	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Bandung	1 Laporan	95.060.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	5	2	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Bandung	2 Laporan	2.934.297.021,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	4	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kabupaten Bandung	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
		2	13	5	2	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bandung	12 Dokumen	2.313.377.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
Jumlah 2											17.387.159.219,00	
Jumlah Total											30.384.913.934,56	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung tahun 2025 yang berisi prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan APBD.

Perubahan Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ttd

TATA IRAWAN SUBANDI

BUPATI BANDUNG,

TTD

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA